

BAB VI

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis atau dugaan sementara yang diajukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena salah satu komponen perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yaitu indeks pendidikan yang didalamnya terdapat komponen rata-rata lama sekolah, menyatakan bahwa adanya kesenjangan di berbagai Provinsi di Pulau Jawa, bahkan beberapa provinsi rata-rata lama sekolah berada di bawah rata-rata lama sekolah di Indonesia.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dikarenakan Tingkat Pengangguran Terbuka memunculkan kesenjangan pendapatan maka semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka maka ketimpangan pendapatan akan semakin membesar.

3. Hasil pengujian variabel Penanaman Modal Asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menduga bahwa Penanaman Modal Asing berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini dikarenakan nilai investasi asing yang masuk di Pulau Jawa di 5 urutan terbesar ditanamkan melalui sektor dengan padat modal yang tergambar dalam sektor tersier dibandingkan dengan padat karya, dimana padat modal lebih mengutamakan modal dibandingkan tenaga kerja. Jadi walaupun peningkatan Penanaman Modal Asing berdampak menurunkan ketimpangan pendapatan, akan tetapi hal tersebut tidak secara signifikan.
4. Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018. Hal ini tidak sesuai hipotesis yang menduga bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018. Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dikarenakan menurut peraturan pemerintah keuangan No.81/PMK.07/2013 bahwa transfer dana bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, yang dimana dana perimbangan yang diterima oleh provinsi di Pulau Jawa terdapat kesenjangan, terlebih provinsi dengan tingkat derajat desentralisasi yang tinggi dan memiliki nilai kemiskinan rendah, mendapat dana transfer lebih tinggi di bandingkan dengan provinsi lainnya, sedangkan provinsi dengan nilai derajat

desentralisasi fiskal rendah dan cenderung memiliki nilai kemiskinan yang tinggi mendapatkan nilai dana transfer yang lebih rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Indeks pembangunan manusia yang seharusnya menjadi representasi dari kualitas manusia tidak menjamin akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di Pulau Jawa, oleh sebab itu pemerintah diharapkan melakukan gerakan yang berkesinambungan agar memacu naiknya IPM terutama pada indeks pendidikan, yang lebih berkualitas, dan diharapkan dapat menghasilkan lulusan terbaik dan sesuai tuntutan dunia kerja, agar pemerataan terjadi di Pulau Jawa sehingga pendapatan semakin merata.
2. Dari sisi tingkat pengangguran terbuka yang semakin tinggi nilainya akan terus menambah ketimpangan pendapatan, hendaknya pemerintah meningkatkan jiwa kewirausahaan serta membuat kebijakan yang mendukung tumbuhnya ekonomi kerakyatan atau sektor informal yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.
3. Nilai investasi asing yang masuk mampu menurunkan ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018 namun tidak secara signifikan, dikarenakan nilai investasi yang tinggi ditanamkan di sektor padat modal. Pemerintah diharapkan lebih selektif dalam penerimaan investasi asing yang masuk ke dalam negeri tertutama di Pulau Jawa, dan melakukan pemerataan

lokasi bagi investasi asing yang masuk, tanpa mengurangi kerjasama yang sudah di bangun dengan baik oleh berbagai Negara.

4. Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan wewenang pemerintah pusat yang turun ke pemerintahan daerah, seharusnya hal ini bisa dimaksimalkan, terlebih pemerintah daerah yang lebih paham terhadap kebutuhan dan kondisi daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Selain itu, anggaran pengeluaran pemerintah daerah lebih diperhatikan terlebih pada belanja modal dan belanja yang tidak memiliki nilai return seperti belanja pegawai.

C. Keterbatasan Penelitian

Ada banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, namun penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel yang didapatkan dan dianalisis. Selain itu, objek penelitian hanya menggunakan 6 provinsi di Indonesia yang ada di Pulau Jawa, serta tahun yang digunakan dalam penelitian hanya dibatasi dengan 7 tahun saja yaitu tahun 2012 hingga 2018.